

ABSTRAK

Impal, NurYanti Mustari, Muh. Ahmad Taufik. Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Imprakstruktur Di Desa Talaga Baru Kabupaten Buton

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengutamakan data dalam bentuk kalimat/ Pernyataan yang bersumber dari data primer/informan. Informasi tersebut di pilih sesuai dengan informan terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pemekaran Desa Talaga Baru Kabupaten Buton berdasarkan permasalahan yang dibahas. Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena tipe penelitian ini berusaha menggambarkan data yang telah diolah dan mengkaji secara analisis dan sistematis berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Adapun hasil penelitian yaitu Efektivitas pemekaran dalam mewujudkan kualitas pemerataan pembangunan yaitu efektifitas pemekaran dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik, menunjukkan bahwa lewat pemekaran desa pemerintah/perangkat desa, Efisiensi menurut Dunn dalam (Purnamasari & Ramdani, 2019) sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai, Pemerataan pembangunan infrastruktur, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Pasca pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Talaga Baru masih sangat terbatas seperti hanya tersedia satu unit komputer, kursi plastik dan meja kayu serta toilet umum Responsivitas adalah para transmigran dan pihak pemerintah kecamatan sebagai wakil pemerintah daerah. Bagi warga transmigran, keikutsertaan mereka dalam program transmigrasi dikarenakan untuk mengubah keadaan ekonomi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, kebijakan pembangunan Pembangunan infrastruktur yaitu perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya belum dapat dilaksanakan atau belum terealisasi dan juga beberapa pembangunan yang sudah ada dibiarkan terbengkalai begitu saja. Sasaran yang telah direncanakan dalam pembangunan infrastruktur belum tercapai. Serta kendala dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Talaga Baru yaitu kurangnya dana menjadi kendala utama dalam proses pembangunan infrastruktur.

Kata kunci: Pemekaran, Infrastruktur, Pembangunan Desa